



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 18 Lamongan - Kode Pos. 62217
Telp. (0322) 321030 Fax. (0322) 312264 E-mail : dpkh@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 524/ 713 / 413.114/2024

Lamongan, 11 Juni 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Kepada

Yth. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2024 Dinas
Pernakan & Keswan Kabupaten
Lamongan

Disampaikan dengan hormat Laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II
Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN



SHOEIAH NURHAYATI, SP. MSI.

Pembina Tingkat I
NIP. 19720420 199602 2 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomor 18 Lamongan

Telepon. (0322) 321 030, Fax. (0322)312264

E-Mail : dpkh@lamongankab.go.id

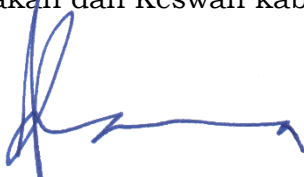
Website : www.lamongankab.go.id/dpkh



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 18 Lamongan - Kode Pos. 62217
Telp. (0322) 321030 Fax. (0322) 312264 E-mail : dphk@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	MR – 02.24
TANGGAL TERBIT	:	11 Juni 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Peternakan dan Keswan Kab. lamongan  ABDUL MANAF D., S.E.Ak., M.S.A. Pembina NIP. 19720503 200604 1 009
Diperiksa	:	SEKRETARIS Dinas Peternakan dan Keswan kab. Lamongan  Drh. RAHENDRA PRASETYA E.S. Pembina Tk. I NIP. 19751011 200604 1 011
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN  SHOFIAH NURHAYATI, SP. MSi. Pembina Tingkat I NIP. 19720420 199602 2 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Tabel II.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan 2

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Menurunnya Populasi Ternak	RSO 01	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Munculnya Wabah Penyakit Hewan Menular yang Sebelumnya Belum Ada	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kepala Dinas	Tiap Triwulan
2	Peternak tidak menggunakan teknologi untuk beternak	ROO 02	Sosialisasi Teknologi Kepada Para Peternak	Respon Peternak Masih Rendah	Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Lebih Intens	Kabid Budidaya	Triwulan 2 dan 3
3	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewat Belum Optimal	ROO 03	Peningkatan Kapasitas Petugas	Koordinasi dengan Intansi Terkait Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
4	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	ROO 04	Validasi Data dan Informasi Tentang Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Unggul	Masih Terdapat Data Yang Kurang Valid	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Kabid Budidaya	Tiap Triwulan
5	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	ROO 07	Peningkatan Kompetensi Petugas, Koordinas Antar Instansi, Penyediaan Sarana Prasarana, Pelaksanaan Sesuai SOP, Monitorng/Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan.	Ada Kasus/Penyakit Baru Yang Sebelumnya Belum Ada dan Lalu Lintas Hewan Ternak Tinggi.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
6	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan dan Produk Hewan yang Dilalulintaskan	ROO 08	Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi Antar Intansi dan KIE Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
7	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	ROO 09	Meningkatkan Kompetensi Petugas dan Penyediaan Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan	Manajemen Pelayanan Masih Perlu Perbaikan	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Kabid Keswan	Tiap Triwulan
8	Persyaratan Kelayakan Mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tidak Terpenuhi	ROO 10	Sosialisasi Kepada Para Pelaku Usaha	Kesadaran Pelaku Usaha Masih Kurang	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3
9	Banyaknya Pemotongan Hewan	ROO 11	Sosialisasi Kepada Para Pelaku Usaha	Kesadaran Pelaku Usaha Masih Kurang	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3

	Ternak yang Tidak Bisa Diawasi						
10	Penyakit Zoonosis Tidak Terkendali	ROO 12	Pelaksanaan Vaksinasi dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Perubahan Cuaca/Musim yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit Hewan	Monitoring Dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Terkait Zoonosis serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kabid PPHP	Tiap Triwulan
11	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pertanian	ROO 13	Sosialisasi Lewat Media Sosial	Belum Semua Masyarakat Memahami	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3
12	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	ROO 14	Sosialisasi Lewat Media Sosial	Belum Semua Masyarakat Memahami	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Keswan	Triwulan 2 dan 3
13	Pembinaan Kelompok Kurang Optimal	ROO 15	Penyuluhan Lebih Intens	Penyuluhan Hanya Dihadiri Beberapa Kelompok Yang Aktif	Peningkatan Penyuluhan dengan Mengundang Semua Kelompok Peternak	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan 2, yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Tribulan 2

No	Risiko Prioritas	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Pelaksanaan
1	Menurunnya Populasi Ternak	Monitoring dan Surveilans Penyakit Hewan serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kepala Dinas	Tiap Triwulan	Bulan Apri – Juni 2024
2	Peternak tidak menggunakan teknologi untuk beternak	Sosialisasi, Pembinaan dan Fasilitasi Lebih Intens	Kabid Budidaya	Triwulan 2 dan 3	Bulan Apri – Juni 2024
3	Pengawasan Mutu, Khasiat dan Keamanan	Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	Bulan Apri – Juni 2024

	Obat Hewat Belum Optimal				
4	Data dan Informasi tentang ternak dan hijauan pakan ternak (HPT) unggul tidak akurat	Pendekatan dan Pengawasan Lebih Intensif	Kabid Budidaya	Tiap Triwulan	Bulan Apri – Juni 2024
5	Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Zoonosis Tidak Dapat Tertangani dan Terkendali dengan Baik.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	Bulan Apri – Juni 2024
6	Masuknya Penyakit Hewan pada Hewan dan Produk Hewan yang Dilalulintaskan	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE)	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	Bulan Apri – Juni 2024
7	Kualitas Pelayanan Kurang Memadai	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Kabid Keswan	Tiap Triwulan	Bulan Apri – Juni 2024
8	Persyaratan Kelayakan Mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tidak Terpenuhi	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3	Bulan Apri – Juni 2024
9	Banyaknya Pemotongan Hewan Ternak yang Tidak Bisa Diawasi	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Kesmavet	Triwulan 2 dan 3	Bulan Apri – Juni 2024
10	Penyakit Zoonosis Tidak Terkendali	Monitoring Dan Surveilans Penyakit Hewan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Terkait Zoonosis serta Perawatan Hewan Pada Perubahan Musim	Kabid PPHP	Tiap Triwulan	Bulan Apri – Juni 2024
11	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pertanian	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3	Bulan Apri – Juni 2024
12	Tidak Terpenuhinya Persyaratan Teknis dan Administrasi Permohonan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Sosialisasi Lebih Intens	Kabid Keswan	Triwulan 2 dan 3	Bulan Apri – Juni 2024
13	Pembinaan Kelompok Kurang Optimal	Peningkatan Penyuluhan dengan Mengundang Semua Kelompok Peternak	Kabid PPHP	Triwulan 2 dan 3	Bulan Apri – Juni 2024

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan penyakit hewan serta metode perawatan yang tepat bila penyakit hewan terjadi pada ternak.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Namun untuk mengurangi resiko penyakit pada hewan ternak, perlu diintensifkan sosialisasi kepada masyarakat peternak tentang tata cara pencegahan penyakit pada hewan ternak serta perawatan jika resiko penyakit hewan terjadi, serta percepatan program Vaksinasi PMK, sehingga dapat mengurangi resiko penyebaran penyakit hewan serta meminimalisir kematian pada hwan ternak.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulkan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanganan penyakit pada hewan disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan penyakit pada hewan, serta masih adanya ternak sapi yang belum tervaksinasi. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanganan pada penyakit hewan yang sering dijumpai di Kabupaten Lamongan, serta malakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi PMK.